

Legal Analysis on The Renewable Energy Directive II of European Union Pursuant to Article III Concerning National Treatment Obligation Under General Agreement on Tariffs and Trade 1994

By:

Prima Mega Purwatama¹, M. Hawin²

ABSTRACT

This research is conducted to analyze the consistency of the Renewable Energy Directive II of the European Union with the World Trade Organization Agreements, especially the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. This research is inspired from the concerns of the palm oil producers on the measure under the directive which are potentially unfavorable for them.

This research uses normative approach to answer the research questions. This research also utilized literature research. The data acquired are primary, secondary and tertiary. The data are analyzed through descriptive analysis observation on case laws and scholarly works.

The research analyzed the measures with Article III and Article XX of GATT 1994. It is found that the measures are inconsistent with the obligations under Article III:4 and III:5 second sentence of GATT 1994. The measures are also inconsistent with Article XX of GATT 1994 because they are considered as disguise restrictions on international trade.

Keywords: Renewable Energy Directive, World Trade Organization, Biofuels, Palm Oil, International Trade, Business Law.

¹ Student of Faculty of Law, Business Law Department, 2014, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of Faculty of Law, Business Law Department, Universitas Gadjah Mada

Analisis Hukum Tentang Pedoman Energi Terbarukan II Uni Eropa Berdasarkan Pasal III Tentang Kewajiban Perlakuan Nasional Menurut Perjanjian Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994

Oleh:

Prima Mega Purwatama¹, M. Hawin²

INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsistensi dari Arahan Energi Terbarukan II Uni Eropa dengan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia, khususnya Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994. Penelitian ini terinspirasi dari keprihatinan para produsen minyak sawit pada kebijakan dibawah Arahan Energi Terbarukan II yang berpotensi merugikan produsen minyak sawit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian tinjauan kepustakaan. Data yang diperoleh adalah primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis melalui observasi analisis deskriptif pada kasus-kasus hukum dan tulisan cendekiawan.

Penelitian ini menganalisis kebijakan-kebijakan dalam Arahan Energi Terbarukan II dengan Pasal III dan Pasal XX dari GATT 1994. Ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak konsisten dengan kewajiban berdasarkan Pasal III: 4 dan III: 5 kalimat kedua GATT 1994. Kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak konsisten dengan Pasal XX dari GATT 1994 karena dianggap sebagai pembatasan terselubung pada perdagangan internasional.

Kata kunci: Pedoman Energi Terbarukan, Organisasi Perdagangan Dunia, Biofuels, Minyak Kelapa Sawit, Perdagangan Internasional, Hukum Bisnis.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Departemen Hukum Dagang, 2014, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Fakultas Hukum, Departemen Hukum Dagang, Universitas Gadjah Mada